

PPID

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**Dokumen Pelaksanaan PPID DP3APKB
Nomor : 500.12.1/002/PPID-DP3APKB/2024**

- **DATA ANGGARAN PENUNJANG KEGIATAN PPID 2023 – 2024**
- **DATA KANAL LAYANAN INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL**
- **RUANG / MEJA LAYANAN INFORMASI PPID**
- **PERMASALAHAN/KENDALA YANG DIHADAPI SERTA MASUKAN DAN SARAN TERHADAP PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

DATA ANGGARAN PENUNJANG KEGIATAN PPID 2023 – 2024

TAHUN 2023		
PROGRAM KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp. 69.502.450,-	<i>Mencakup Pengelolaan data gender dan anak, koordinasi dan pengelolaan Informasi</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 453.243.129,-	<i>Mencakup Pengembangan SPBE dan Infrastruktur layanan Digital serta Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi</i>
Total	Rp. 522.745.579	

TAHUN 2024		
PROGRAM KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp. 66.673.010,00,-	<i>Mencakup Pengelolaan data gender dan anak, koordinasi dan pengelolaan Informasi</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 180.134.100,-	<i>Mencakup Pengembangan SPBE dan Infrastruktur layanan Digital serta Honorarium Tim PPID dan Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi</i>
Total	Rp. 249.636.550	

DATA KANAL LAYANAN INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL

1. Official website Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Alamat Url : dp3appkb.kalteng.go.id

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Engku Kasuma No.11, Palangkaraya Kalimantan Tengah, 72111

BERANDA | PROFIL | LAYANAN PUBLIK | PUBLIKASI | GALLERY | APLIKASI TEKNIK | LAINNYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KELUARGA KEREN CEGAH STUNTING

PENGADUAN MASYARAKAT
Sampaikan keluhan dan pengaduan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui:
Telepon: Telp / WA : 0821 3560 0226

PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
Laporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diujikan korban, keluarga atau masyarakat umum kepada UPTPPA Provinsi Kalimantan Tengah melalui:
Telepon: Telp / WA : 0811 5201 212

UPT-PPA Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Pelayanan Terpadu
SOP Layanan
Formulir Kasus Anak
Formulir Kasus Dewasa

TELEPON | WHATSAPP

PERMINTAAN INFORMASI
Rajual Pengada Informasi dan Dokumentasi (PRID).
Tata Cara Permintaan Informasi
SOP PRID
Formulir Permohonan Informasi
Survei Kepuasan Pelayanan Informasi 2022
PRID Provinsi Kalimantan Tengah

LAYANAN PENGADUAN DAN LAPORAN
Selap Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah wajib melaporkan grafik yang diterima kepada KPK.
Lapor Grafik
Sistem Pengelolan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) - Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPORI) menjamin hak masyarakat agar pengaduan dan keluhan dan jika apapun akan diadukan kepada penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawabnya.
Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

78 TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

INO RIHARTO SABBAN | S. SOHANTO SABBAN, SIP | S. EDY WISMA, S.Si., M.Si | S. RANI ANDRIANI PUTRI
S. LINDA VICTORIA ALBA, M.Pd

2. Official website UPTPPA Provinsi Kalimantan Tengah Alamat Url : uptppa.kalteng.go.id

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 11, Jalan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 72111

BERANDA | PROFIL | LAYANAN UPT PPA | PUBLIKASI | GALLERY

PENJANGKAUAN KORBAN

Mendampingi korban melapor ke polisi, pendampingan visum et repertum, mendampingi psikologis kepada korban dan keluarga dan memfasilitasi rumah aman bagi korban dan keluarga.

• • • • •

<h3>PENGADUAN KEKERASAN</h3> <p>Laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diajukan korban, keluarga atau masyarakat umum kepada UPT-PPA Provinsi Kalimantan Tengah melalui:</p> <p>Telepon/Tel./WA: 0811 5201 510</p> <p>SOP Layanan</p> <p>FORMULIR</p> <p>Formulir Kasus Anak Formulir Kasus Dewasa</p> <p>TELEPON WHATSAPP</p>	<h3>TENTANG UPT PPA</h3> <p>Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dibentuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus dan masalah lainnya.</p> <p>LAYANAN</p> <ul style="list-style-type: none">Pengaduan KekerasanPenjangkauan korbanPengelolaan kasusPenampungan sementaraMediasi KonflikPendampingan korban	<h3>PENGADUAN UMUM</h3> <p>Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah juga melaporkan grafik yang dirilis kepada KPK.</p> <p>Lapor Gratifikasi</p> <p>Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan diadukan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.</p> <p>Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat</p>
---	--	--

4. PENAMPUNGAN SEMENTARA
5. MEDIASI
6. MIMBAKA KORAN

“Kerja Bersama untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia menuju Kalteng Bermartabat Elok Relegius Kuat Amanah Harmonis”

3. Portal layanan PPID Dinas P3APPKB Url : dp3appkb.kalteng.go.id/ppid/info-cepat.html

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Brigjen Karamas No.11, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73111

BERANDA | PROFIL | LAYANAN PUBLIK | PUBLIKAS | GALLERY | APLIKAS TEKNIK | LAINNYA

PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

[Formulir Permohonan Informasi](#) | [Dokumen Informasi Publik Bertela](#)

[Dokumen Informasi Selang Sasi](#) | [Dokumen Informasi Publik Serta Merta](#)

[Dokumen Informasi Publik yang Dikecualikan](#)

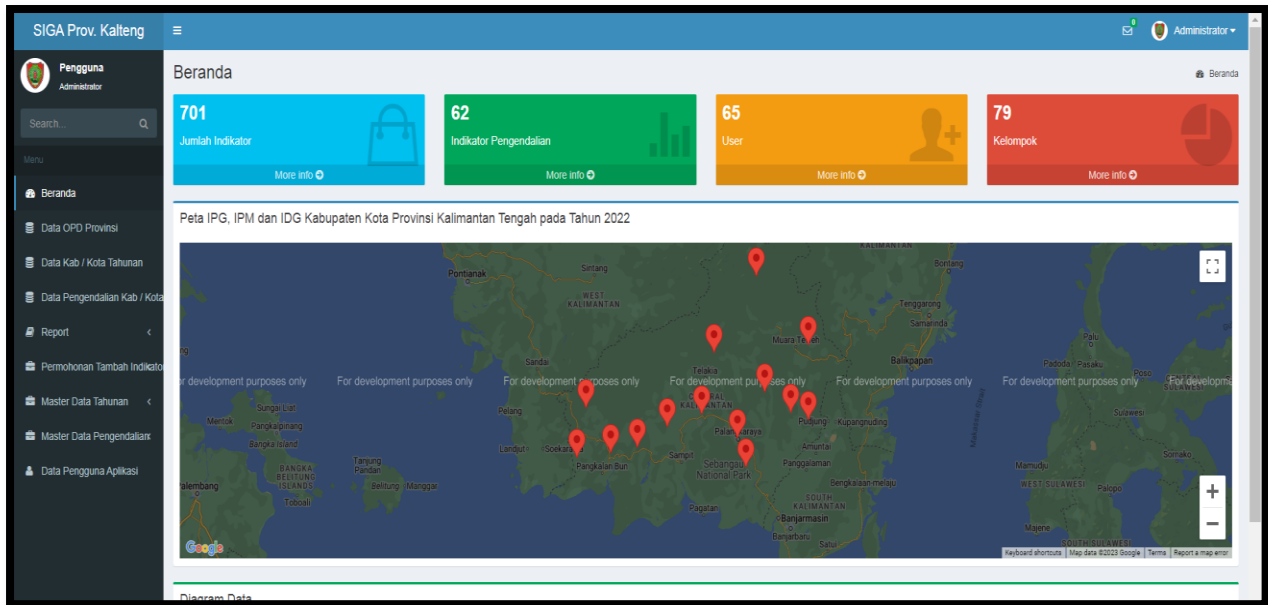
Hubungi Kami
Jl. Brigjen Karamas No.11, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73111
Telepon: +62 811-3201-015

Map | Satellite

DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Brigjen Karamas No.11,
Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
73111
Phone: +62 811-3201-015

© DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 2024

4. Portal layanan Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Url : dp3appkb.kalteng.go.id/siga



5. Portal layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Url : uptppa.kalteng.go.id/info-cepat.html

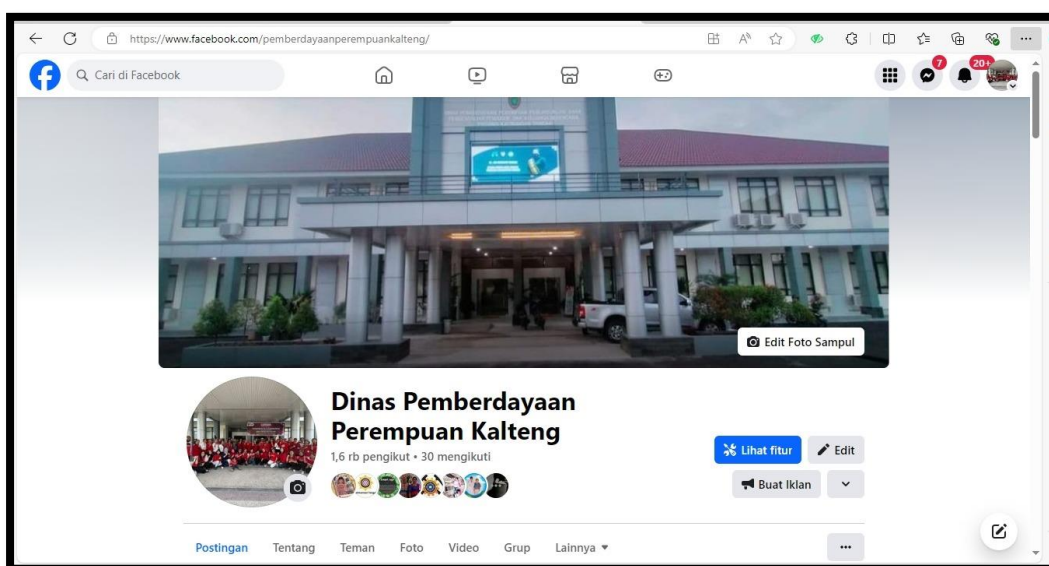
6. Portal layanan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, LaPAK (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)

Url : uptppa.kalteng.go.id/lapak/

The screenshot shows the 'LaPAK UPTPPA' web application interface. The user is logged in as 'Hero Walpatera, Administrator'. The main menu on the left includes 'MANAJEMEN KASUS' (Entry Pengaduan Online: 1, Kasus Rujukan: 1, Kasus Berjalan: 31, Kasus Selesai: 2, Kasus Diarsipkan: 0), 'INPUT KASUS BARU' (Input Kasus Baru), 'RINGKASAN', and 'MANAJEMEN USER' (Daftar Pengguna, Pengguna Baru). The 'INPUT KASUS BARU' form is displayed, featuring fields for 'Detail Kasus', 'Tanggal Kejadian' (22/07/2024), 'Tempat Kejadian' (Rumah Tangga), 'Kabupaten', 'Kecamatan', 'Kelurahan' (Contoh: Ampah Kota), 'KLASIFIKASI KASUS' (Jenis Kekerasan: Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran Rumah Tangga, Human Trafficking), 'Kronologi / Deskripsi Kasus', and 'Asal Kasus' (Datang Sendiri). There are also sections for 'Identitas Korban', 'Identitas Pelapor', and 'Identitas Terlapor'.

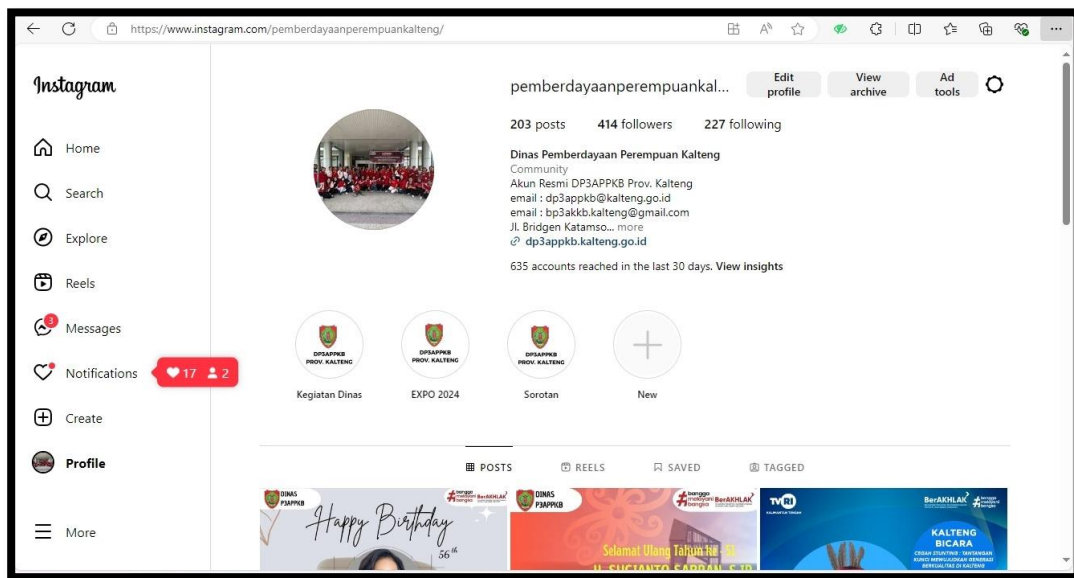
7. Facebook Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Url : www.facebook.com/pemberdayaanperempuankalteng/



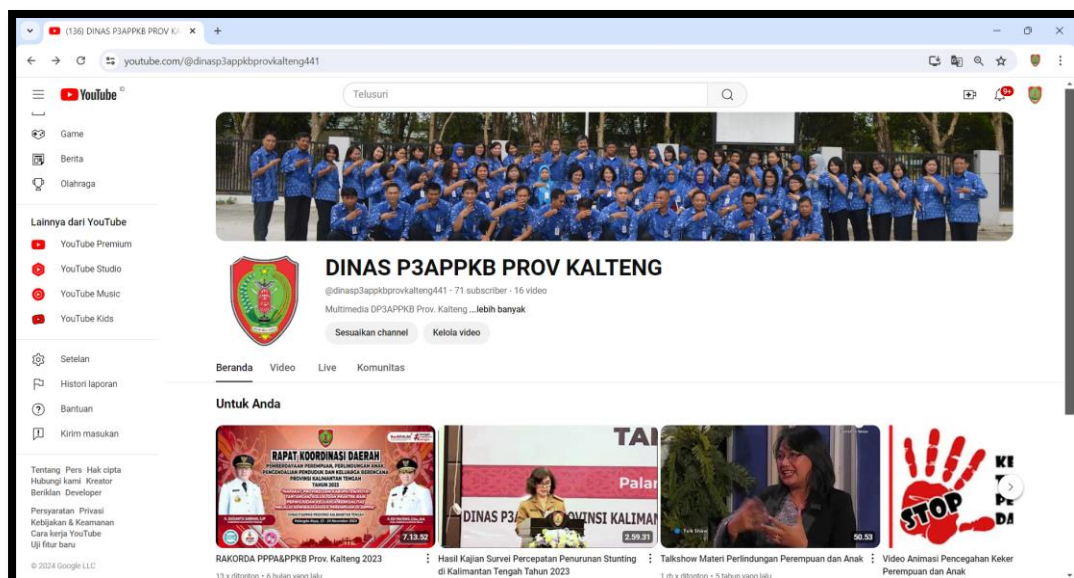
8. Instagram Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

URL : www.instagram.com/pemberdayaanperempuankalteng/



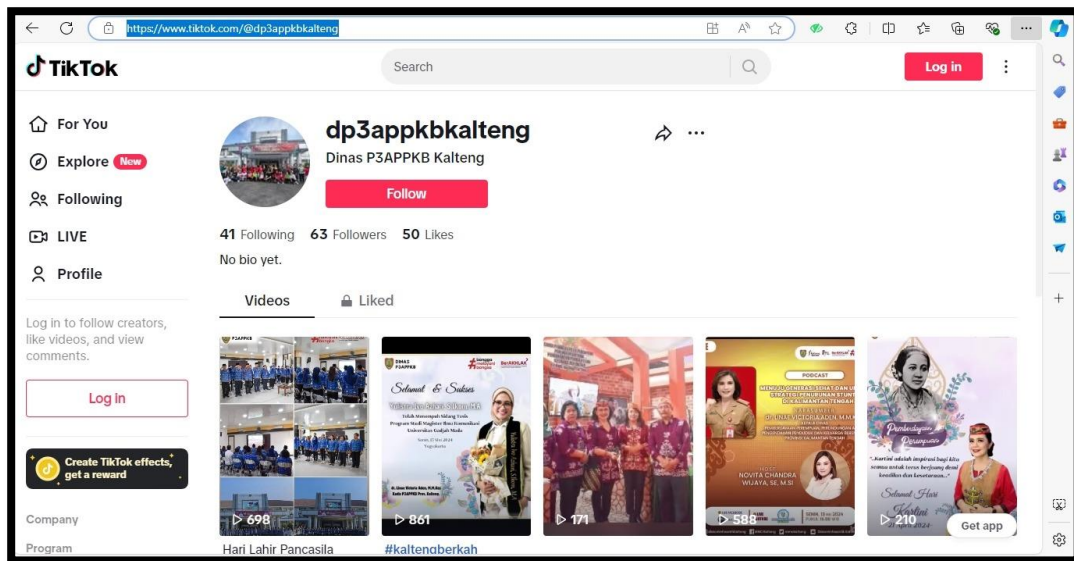
9. Youtube Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

URL : www.youtube.com/@dinas3appkbprovkalteng441



10. Tiktok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

URL : <https://www.tiktok.com/@dp3appkbkalteng>



RUANG / MEJA LAYANAN INFORMASI PPID

1. Ruang PPID



2. Kotak Pengaduan



PERMASALAHAN/KENDALA YANG DIHADAPI SERTA MASUKAN DAN SARAN TERHADAP PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berikut adalah permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan layanan Publik secara umum di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, beserta masukan dan saran untuk mengatasinya sebagai berikut :

PERMASALAHAN/KENDALA

1. Aksesibilitas Informasi:

- Kurangnya akses informasi di daerah terpencil dan pedesaan.
- Infrastruktur teknologi yang terbatas di wilayah-wilayah tertentu.

2. Kualitas Informasi:

- Informasi yang tidak selalu akurat, lengkap, dan up-to-date.
- Kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi terkait program dan layanan.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia:

- Pegawai yang bertugas belum memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan dan penyebaran informasi.
- Keterbatasan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas layanan informasi publik.

4. Sosialisasi dan Edukasi:

- Minimnya sosialisasi mengenai program dan layanan yang disediakan oleh dinas.
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan informasi publik.

5. Birokrasi yang Rumit:

- Proses permohonan informasi yang rumit dan memakan waktu.
- Hambatan administratif yang menghalangi akses cepat terhadap informasi.

6. Keterbatasan Sumber Daya:

- Terbatasnya anggaran dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- Kekurangan alat dan teknologi yang mendukung penyampaian informasi.

MASUKAN DAN SARAN

1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi:

- Pemerintah daerah dapat meningkatkan infrastruktur komunikasi dan jaringan internet di daerah-daerah terpencil untuk memastikan akses informasi yang merata.

2. Peningkatan Kualitas dan Transparansi Informasi:

- Menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan up-to-date melalui berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas dan transparansi informasi yang disampaikan.

3. **Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:**

- Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi pegawai terkait pengelolaan dan penyebaran informasi publik.
- Meningkatkan keterampilan digital bagi petugas dan masyarakat melalui program-program edukasi.

4. **Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat:**

- Mengadakan kampanye sosialisasi mengenai program dan layanan yang disediakan oleh dinas serta cara mengaksesnya.
- Membuat materi edukasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat, termasuk di pedesaan.

5. **Penyederhanaan Prosedur:**

- Menyederhanakan prosedur permohonan informasi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- Mengurangi birokrasi yang tidak perlu untuk mempercepat proses penyampaian informasi.

6. **Optimalisasi Penggunaan Media Sosial dan Platform Digital:**

- Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat.
- Mengembangkan aplikasi atau portal online yang memudahkan masyarakat mengakses informasi secara mandiri.

7. **Pengalokasian Anggaran yang Memadai:**

- Mengusulkan peningkatan anggaran untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia.
- Memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- Kerjasama dengan Pihak Lain, Bekerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung pengembangan layanan informasi publik.

8. **Feedback dan Evaluasi Berkelanjutan:**

- **Mekanisme Feedback:** Membangun mekanisme untuk menerima umpan balik dari masyarakat mengenai layanan informasi publik yang disediakan.
- **Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas dan efektivitas layanan informasi publik dan melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

IMPLEMENTASI STRATEGI

Untuk mengimplementasikan usulan dan masukan di atas, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:

1. **Pembentukan Tim Khusus:** Membentuk tim khusus yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pengembangan layanan informasi publik.
2. **Rencana Aksi Jangka Panjang dan Pendek:** Menyusun rencana aksi jangka panjang dan pendek dengan target yang jelas untuk setiap tahap pengembangan.
3. **Sosialisasi dan Komunikasi:** Melibatkan berbagai pihak terkait dalam sosialisasi dan komunikasi mengenai pentingnya pengembangan layanan informasi publik.
4. **Pengawasan dan Evaluasi:** Menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan setiap langkah yang diambil berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan.

Dengan penerapan usulan dan masukan ini, diharapkan layanan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berkembang dengan lebih baik, efektif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Palangka Raya, 22 Juli 2024

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 006